

Besok, Buruh akan Geruduk

Dari Halaman 1

menghindari PHK yang diduga bisa mencapai ratusan ribu buruh akibat tutupnya PT Sritex," kata Iqbal melalui keterangan tertulis, Senin (3/3). Demonstrasi itu akan difokuskan di Istana dan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan. KSPI juga akan melakukan aksi unjuk rasa di Semarang, Jawa Tengah.

Iqbal menyampaikan enam tuntutan demonstrasi itu. Pertama, bongkar total penyebab penutupan pabrik dan PHK massal buruh Sritex.

Kedua, selamatkan industri nasional dan sektor riil di tengah ancaman badai PHK. Tuntutan ketiga hapus sistem outsourcing yang semakin masif.

Para buruh juga menuntut pembayaran THR tahun ini. Mereka mendesak tak ada pemutusan kontrak dan PHK buruh sebagai cara menghindari pembayaran THR.

Tuntutan kelima pengadilan bagi para koruptor. Keenam, cabut Permendag Nomor 8 Tahun 2023 yang membuka pintu impor secara ugul-ugalan dan menjadi penyebab PHK besar-besaran di sektor tekstil serta impor truk.

Sebelumnya, pabrik tekstil Sritex tutup 1 Maret 2025. Sekitar 10 ribu orang pegawai mengalami PHK.

Penutupan pabrik menjadi buntut dari putusan Pengadilan Niaga Semarang yang menyatakan Sritex pailit melalui putusan Nomor No. 12/Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg tanggal 25 Januari 2022.

Mahkamah Agung menegaskan putusan itu lewat penolakan kasasi, 19 Desember 2024. Tim kurator kepailitan Sritex telah menyatakan perusahaan tekstil itu punya utang Rp29,8 triliun. (cnni/js)

KontraS Datangi DPR

Dari Halaman 1

dengan kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN).

Sebab, kata dia, RUU Polri mengatur penambahan kewenangan intelijen dan keamanan bagi Korps Bhayangkara.

"Di satu sisi berkenaan dengan TNI kami melihat ada upaya pengurangan perluasan jabatan sipil yang kemudian diperbolehkan begitu ya menduduki jabatan-jabatan tertentu dan diisi oleh prajurit aktif," jelas dia.

"Hal ini kami menilai sangat bermasalah dan berpotensi mengembalikan pemerintahan pada rezim orde baru atau rezim Soeharto selama 32

tahun," sambungnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan salah satu poin pembahasan dalam revisi UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI adalah terkait perubahan masa pensiun dan usul penghapusan aturan yang melarang prajurit berbisnis.

Usia pensiun prajurit diatur dalam pasal 53 UU TNI berbunyi 'Prajurit melaksanakannya dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira, dan 53 tahun bagi bintangara dan tamtama'.

"Itu-itu saja. Masa pensiun seputar itu," kata Adies di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2).

Teranyar, Anggota Komisi I Hasanuddin

mengatakan pihaknya membuka peluang untuk memperluas pembahasan perubahan sejumlah pasal dalam RUU TNI.

Komis I DPR hingga saat ini belum menetapkan jadwal pembahasan revisi UU tersebut meski pemerintah mengirim Surat Presiden (Surpres) untuk membahasnya.

Menurut Hasan, perluasan pembahasan masih dimungkinkan seiring dinamika pembahasan antara pemerintah dan DPR nanti.

"Mungkin ada perubahan pasal, atau penambahan dan sebagainya. Dinamika itu akan terus terjadi dalam proses nanti Panja itu bekerja antara Panja Komisi I dengan Panja pemerintah," kata Hasan saat dihubungi, Kamis (20/2). (cnni/js)

Dirut Pertamina Janji Benahi Diri

Dari Halaman 1

cayaan masyarakat Indonesia.

"Saya, Simon Aloysius Mantiri, sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero), menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini," kata Simon dalam jumpa pers di Jakarta, disiarkan kanal YouTube Pertamina, Senin (3/3).

Simon mengatakan Pertamina sudah berdiri 67 tahun. Mereka selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik di bidang energi untuk masyarakat Indonesia.

Meski begitu, dia mengakui ada beberapa hal yang dilakukan Pertamina melukai hati rakyat. Oleh karena itu, dia berjanji untuk terus membenahi Pertamina agar sesuai dengan keinginan rakyat.

Simon menyampaikan masih banyak pegawai Pertamina yang baik. Dia menyebut pegawai-pegawai itu berjiwa Merah Putih.

"Kami bersama insan-insan di Pertamina akan terus berkomitmen untuk membenahi diri kami. Kami telah membentuk Tim Crisis Center untuk mengevaluasi keseluruhan proses bisnis, terutama dari aspek operasional," ucapnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung meringkus sembilan orang terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018-2023. Enam orang di antaranya adalah pejabat Pertamina Patra Niaga, anak perusahaan Pertamina.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menyebut sejumlah pejabat Pertamina diduga melakukan pengkondisian dalam Rapat Optimasi Hilir (OH) untuk menurunkan readiness/produksi kilang sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap sepenuhnya. Den-

gan demikian, pemenuhan BBM bisa dilakukan dengan impor.

Selain itu, diduga ada pemufakatan jahat mengatur proses pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang. Melalui pengaturan tersebut pengondisian pemenang broker seolah-olah sesuai dengan ketentuan.

Riva Siahaan, Dirut Pertamina Patra Niaga juga diduga menyelewengkan pembelian spek minyak. RS disebut melakukan pembelian untuk jenis Ron 92 (Pertamax) padahal yang dibeli adalah Ron 90 (Pertalite).

"Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian untuk Ron 92 (Pertamax), padahal sebenarnya hanya membeli Ron 90 (Pertalite) atau lebih rendah kemudian dilakukan blending di storage/depo untuk menjadi Ron 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan," ucap Qohar.(cnni/js)

Netanyahu Tolak Usulan Gencatan

Dari Halaman 1

Netanyahu hanya memperingatkan bahwa "langkah lebih lanjut" bisa dia lakukan jika Hamas terus menawan warga Israel di Gaza.

"Israel tahu bahwa Amerika dan Presiden [AS Donald] Trump mendukung kita," ucapnya.

Dilansir dari Anadolu Agency, Israel telah menerima usulan dari utusan khusus Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, untuk memperpanjang gencatan senjata sementara selama 50 hari.

Berdasarkan kesepakatan, fase pertama gencatan senjata yang tengah dijalani Israel dan Hamas saat ini semestinya hanya berlangsung 42 hari. Fase pertama yang telah berlaku sejak 19 Januari itu pun telah resmi berakhir pada Minggu

(2/3).

Israel dan Hamas semestinya melangsungkan fase kedua, yang negosiasinya telah dimulai beberapa waktu lalu.

Namun, Netanyahu justru sepakat untuk mengikuti usulan Witkoff yakni memperpanjang fase pertama selama bulan suci Ramadan dan hari raya Paskah Yahudi.

Hamas jelas menolak rencana ini dan sebaliknya menuntut agar gencatan senjata permanen dijalankan sesuai kesepakatan untuk fase kedua.

"Sekali lagi, Israel telah menerima rencana ini. Saya menerima rencana ini. Tapi sejauh ini, Hamas menolaknya," ucap Netanyahu.

Fase kedua gencatan senjata Hamas-Israel meliputi kesepakatan soal gencatan senjata

permanen. Pada fase ini, Israel dan Hamas mesti sepakat untuk gencatan senjata permanen dan sebagai gantinya Hamas akan membebaskan sandera laki-laki yang masih hidup, baik itu warga sipil maupun militer.

Israel juga mesti membebaskan lebih lanjut sejumlah tahanan Palestina yang telah disepakati. Pada pembebasan sandera ini, kedua belah pihak mesti menyetujui "perdamaian berkelanjutan".

Seiring dengan ini, Israel wajib menarik tentaranya secara penuh dari Gaza.

Meski ada kesepakatan ini, Netanyahu pada faktanya terus berupaya memperpanjang fase pertama tanpa mau lanjut ke fase kedua. Hal itu semata-mata agar para tawanan dibebaskan sebanyak-banyaknya tanpa perlu mengakhiri perang.(cnni/js)

KPK Umumkan 5 Tersangka

Dari Halaman 1

Tugas Direktur Penyidikan KPK Budi Sukmo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (3/3) petang.

Dalam jumpa pers ini, lembaga antirasuah baru menyampaikan konstruksi kasus yang melibatkan satu debitur saja yakni PT Petro Energy (PT PE). Lima orang ditetapkan sebagai tersangka. Yakni DW dan AS selaku direktur LPEI serta tiga debitur dengan inisial JM, NN dan SMD.

"KPK belum melakukan penahanan terhadap para tersangka. KPK masih terus melengkapi alat bukti dalam proses penyidikan perkara ini," kata Budi.

Berdasarkan informasi, lima orang tersangka tersebut adalah Direktur Pelaksana I LPEI Dwi Wahyudi, Direktur Pelaksana IV LPEI Arif

Setiawan, dan untuk ketiga orang dari PT Petro Energy yakni Jimmy Masrin, Newin Nugroho dan Susy Mira Dewi Sugiarta.

Budi mengatakan diduga telah terjadi benturan kepentingan atau conflict of interest antara direktur LPEI dengan PT PE. Mereka disebut melakukan kesepakatan awal untuk mempermudah proses pemberian kredit. Kata Budi, direktur LPEI tidak melakukan kontrol kebenaran penggunaan kredit sesuai MAP.

"Direktur LPEI memerintahkan bawahannya untuk tetap memberikan kredit walaupun tidak layak diberikan," imbuhnya.

Budi menyatakan PT PE diduga memalsukan dokumen purchase order dan invoice yang menjadi underlying pencairan fasilitas tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

PT PE melakukan window dressing terhadap Laporan Keuangan (LK). PT PE, tambah Budi, menggunakan fasilitas kredit tidak sesuai den-

gan tujuan dan peruntukan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit dengan LPEI." Atas pemberian fasilitas kredit oleh LPEI khusus kepada PT PE ini, diduga telah mengakibatkan kerugian negara sebesar USD60 juta (sekitar Rp900 miliar lebih)," ungkap Budi.

KPK membuka penyelidikan kasus ini pada Maret tahun 2024 lalu dan meningkatkan status ke tahap penyidikan dengan menetapkan lima orang sebagai tersangka pada 20 Februari 2025.

Berikut nama dan jabatan tersangka kasus LPEI:

1. Dwi Wahyudi, Direktur Pelaksana I LPEI.
2. Arif Setiawan, Direktur Pelaksana 4 LPEI.
3. Jimmy Masrin, Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal/Komisaris Utama PT Petro Energy.4. Newin Nugroho, Direktur Utama PT Petro Energy.
5. Susy Mira Dewi Sugiarta, Direktur PT Petro Energy.(cnni/js)

Tingkatkan Makrifatullah

Dari Halaman 1

jadi lebih peka terhadap penderitaan mereka yang kurang beruntung, sehingga mendorong kita untuk lebih banyak berbagi dan membantu sesama.

Hikmah Puasa: Menyehatkan Fisik dan Mental Selain manfaat spiritual, puasa juga memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental.

Dari sisi fisik, puasa membantu:Detoksifikasi tubuh, dengan memberi waktu bagi sistem pencernaan untuk beristirahat.Menyeimbangkan metabolisme, yang dapat mencegah obesitas dan penyakit kronis.

Dari sisi mental, puasa membantu:Mengendalikan emosi, sehingga kita lebih tenang dan tidak mudah stres.Meningkatkan ketenangan jiwa, dengan lebih banyak berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah.

Bentuk Ketaatan dan Syukur

Allah SWT telah mewajibkan puasa bagi orang-orang beriman agar mereka bertakwa. Dalam Al-Qur'an disebutkan: "Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 183)

Dengan menjalankan ibadah ini, kita belajar untuk tunduk pada perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Puasa juga mengajarkan kita untuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Ketika kita menahan diri dari makan dan minum, kita menyadari betapa berharganya rezeki yang selama ini mungkin kita anggap biasa.

Keistimewaan Bulan Ramadhan

Bulan Ramadhan memiliki banyak keutamaan, di antaranya:

1. Bulan diturunkannya Al-Qur'an.Sebagaimana firman Allah:“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil).” (QS. Al-Baqarah: 185)
2. Pintu langit dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelengguHal ini menunjukkan bahwa Ramadhan adalah bulan penuh berkah dan ampunan.
3. Momentum memperdalam ilmu agama. Umam Islam dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an, mengikuti kajian agama, dan meningkatkan kualitas ibadah.Peringatan dari Hadis Nabi; Puasa tidak hanya tentang

menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga dari perkataan dan perbuatan yang buruk. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor dan perbuatan tercela, maka Allah tidak membutuhkan (puasanya), sekalipun ia meninggalkan makan dan minumannya.” (HR. Bukhari)

Hadis ini menegaskan bahwa seseorang yang berpuasa tetapi tetap melakukan keburukan tidak akan mendapatkan pahala, kecuali hanya sekedar lapar dan haus. Oleh karena itu, puasa harus dijalankan dengan kesadaran penuh untuk memperbaiki diri.

Kesimpulan

Bulan Ramadhan adalah kesempatan emas untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Puasa bukan hanya sekedar ritual, tetapi sebuah latihan spiritual untuk memperbaiki diri, mengendalikan hawa nafsu, dan lebih peduli terhadap sesama.

Dengan memahami hikmah puasa dan menjalankannya dengan penuh kesadaran, kita dapat mencapai derajat makrifatullah, yaitu mengenal Allah lebih dekat dan merasakan keberadaan-Nya dalam setiap aspek kehidupan kita.

Semoga kita semua dapat memanfaatkan bulan suci ini dengan sebaik-baiknya dan meraih ketakwaan yang sejati. Aamiin. (*)

Langgar Kesepakatan

Dari Halaman 1

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menyatakan RI mengancam sikap Israel yang secara sepihak menuntut perpanjangan fase pertama gencatan senjata. Tak cuma itu, Indonesia juga mengancam sikap Israel yang menghindari pembahasan fase kedua.

"Indonesia mengancam upaya Israel untuk melemahkan kesepakatan gencatan senjata dengan melanggar ketentuan awal," demikian pernyataan Kemlu RI, Senin (3/3).

Indonesia juga menyatakan keputusan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memblokade bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menjadikannya alat tawar dalam perundingan gencatan senjata merupakan bentuk kejahatan perang.

"Serta [merupakan] pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia," demikian pernyataan Kemlu RI.

Indonesia pun mendesak komunitas internasional untuk memberikan tekanan kepada Israel agar segera mengizinkan pengiriman bantuan kemanusiaan dan melanjutkan fase kedua sesuai kesepakatan gencatan senjata.

"Indonesia menegaskan kembali dukungan teguhnya bagi Solusi Dua Negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan di kawasan," tutup Kemlu RI.

Kantor PM Israel pada Minggu (2/3) menyatakan bahwa seluruh bantuan kemanusiaan yang memasuki Gaza mulai sekarang akan disetop.

Hal itu dilakukan karena Hamas menolak usulan gencatan senjata sementara yang disodorkan utusan khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah Steve Witkoff.

"Israel tidak akan mengizinkan gencatan senjata tanpa dibebaskannya sandera kami," demikian pernyataan Kantor Netanyahu, seperti dikutip Al Jazeera.

Utusan khusus Presiden AS Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, menyodorkan usulan agar gencatan senjata fase pertama Israel-Hamas diperpanjang selama 50 hari sampai Ramadan dan hari raya Paskah Yahudi..(cnni/js)



PHK Masalah Serius

Dari Halaman 1

Perubahan Industri: Pergeseran tren bisnis, seperti peralihan dari ritel fisik ke e-commerce, yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja di sektor tertentu.

Kebijakan pemerintah yakni regulasi ketat atau perubahan kebijakan bisa memengaruhi keberlangsungan bisnis.

Krisis Global yakni pandemi, perang, atau gangguan rantai pasok juga bisa menyebabkan PHK besar-besaran. Dampak PHK massal terhadap pekerja yakni hilangnya pendapatan, kesulitan mencari pekerjaan baru, gangguan psikologis, dan ketidakstabilan keluarga.

Menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya pengangguran, dan potensi resesi. Kehilangan tenaga kerja berpengalaman, menurunnya produktivitas, serta risiko reputasi yang buruk.

Terhadap Sosial yakni meningkatnya kemiskinan, kriminalitas, dan keresahan sosial.

Untuk mengatasi dampak PHK massal, beberapa langkah yang bisa dilakukan:Dari Pemerintah yakni memberikan bantuan sosial atau program pelatihan ulang bagi pekerja terdampak.Menciptakan kebijakan yang mendorong investasi dan pembukaan lapangan kerja baru.Memfasilitasi pekerja agar lebih mudah mendapatkan pekerjaan baru.

Dari Pekerja yakni meningkatkan keterampilan, terutama di bidang digital dan teknologi.

Mencari peluang usaha mandiri atau pekerjaan freelance.

Membangun jaringan profesional untuk mendapatkan peluang kerja baru.

Dari Perusahaan dapat menghindari PHK dengan skema alternatif seperti pengurangan jam kerja atau sistem kontrak fleksibel.Mengadakan pelatihan bagi pekerja agar mereka bisa beradaptasi dengan kebutuhan industri baru.

PHK massal bukan hanya sekadar angka, tapi fenomena yang berdampak besar bagi masyarakat. Langkah proaktif dari pemerintah, pekerja, dan perusahaan diperlukan untuk mengatasi dan mencegah gelombang PHK di masa depan. Adaptasi terhadap perubahan ekonomi dan teknologi juga menjadi kunci agar tenaga kerja tetap relevan di era modern.

Jika ribuan pekerja yang terkena PHK berunjuk rasa ke Istana Negara, ini bisa menjadi tindakan strategis untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah secara langsung.

Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melihat situasi ini:

1. Pekerja yang melakukan demonstrasi biasanya memiliki beberapa tuntutan utama, seperti:

- Menolak PHK massal dan meminta solusi dari pemerintah.Menuntut kompensasi yang layak, seperti pesangon yang sesuai undang-undang.Meminta kebijakan perlindungan tenaga kerja agar PHK tidak terus terjadi.Mendesak pemerintah menciptakan lapangan kerja baru atau memberi insentif bagi perusahaan agar tidak terus melakukan PHK.

- Dampak unjuk rasa bisa menarik perhatian publik dan pemerintah, sehingga masalah PHK tidak diabaikan.Mendorong negosiasi antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja untuk mencari solusi.Memberikan tekanan agar kebijakan tenaga kerja lebih berpihak pada pekerja.

- Dampak Negatif.Jika tidak dikelola dengan baik, aksi bisa berujung pada bentrokan dengan aparat.Bisa mengganggu ketertiban umum, terutama jika blokade jalan atau aksi mogok dilakukan.

2. Respon Pemerintah yang Diharapkan Pemerintah seharusnya tidak hanya sekedar menerima aspirasi, tetapi juga merancang kebijakan konkret seperti:Memberikan subsidi atau bantuan bagi pekerja terdampak.

3. Mendorong investasi dan program penciptaan lapangan kerja baru.

4. Mewajibkan perusahaan memberikan kompensasi yang adil kepada pekerja yang di-PHK.Memfasilitasi pekerja untuk pelatihan ulang agar bisa beralih ke industri yang masih berkembang.

5. Berisiko ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu.

Unjuk rasa ke Istana Negara adalah bentuk ekspresi demokrasi yang sah selama dilakukan dengan damai dan terorganisir. Namun, tanpa strategi yang jelas dan dukungan kebijakan yang konkret, aksi ini bisa berakhir tanpa hasil yang signifikan. Oleh karena itu, penting bagi pekerja dan serikat buruh untuk mengawal aspirasi mereka dengan pendekatan yang strategis, termasuk dialog dengan pemerintah dan perusahaan agar solusi yang lebih berkelanjutan bisa dihasilkan. (*)